BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tugas sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah melaksanakan semua kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku, karena kurikulum di sini merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, berhasil atau tidaknya suatu proses pendidikan sebagian besar ditentukan dari manajemen kurikulum suatu lembaga pendidikan.

Kurikulum pada dasarnya mengacu pada karakteristik peserta didik, perkembangan ilmu dan teknologi pada zamannya juga mengacu kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Penyusunan kurikulum atas dasar acuan keadaan masyarakat tersebut disebut "Kurikulum Muatan Lokal". Kurikulum muatan lokal keberadaan di Indonesia telah dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan nomor 0412/U/1987 tanggal 11 Juli 1987. Sedang pelaksanaannya telah dijabarkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Nomor 173/-C/Kep/M/87 tertanggal 7 Oktober 1987.

Hal inipun diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) pasal 36 ayat 2, yang menyatakan bahwa:

"Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik".

Kemudian pada PP no. 19 tahun 2005 pasal 17 ayat 1 disebutkan bahwa:

"Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI, SD LB/MI LB, SMP/MTS, SMP LB/MTS LB, SMA/MA, SMA LB/MA LB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik".

¹Dakir, *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hlm. 100.

Dalam sistem pendidikan di Indonesia, kurikulum telah mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan. Kurikulum yang paling baru adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang merupakan penyempurna dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi salah satu aplikasi nyata dari diberlakukannya sistem desentralisasi pendidikan di Indonesia.

Sistem desentralisasi pendidikan ini memungkinkan daerah dan lembaga pendidikan untuk mengelola dan mengembangkan kurikulum yang digunakan sesuai dengan kondisi dan keadaan daerahnya agar dapat menghasilkan lulusan yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan daerah tersebut. Salah satu wujud nyata dari sistem desentralisasi pendidikan ini adalah dikembangkannya kurikulum muatan lokal.

Kurikulum muatan lokal harus selalu disesuaikan dengan kondisi masyarakat daerah serta kebutuhan daerah tersebut. Kurikulum yang seperti ini dapat disebut sebagai kurikulum berbasis masyarakat, karena kurikulum muatan lokal dirancang dengan acuan dan landasan kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik dan budayanya. Kurikulum berbasis masyarakat ini merupakan bagian dari pendidikan berbasis masyarakat. Yaitu penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Hal ini logis kiranya, karena dengan kondisi daerah yang berbeda secara logis praktis berdampak pada kebutuhan dan tuntutan yang berbeda pula dan harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan.

Kurikulum muatan lokal menjembatani antara kebutuhan keluarga dan masyarakat dengan tujuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum muatan lokal tidak semata-mata tanggung jawab pendidik, namun menyangkut pula tanggung jawab masyarakat dan pemerintah daerah setempat, terutama dalam menyiapkan bahan-bahan pengajaran, yang sesuai dengan

²Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS beserta Penjelasannya, (Surabaya: Media Centre, 2005), hlm.6.

lingkungan sosial budaya dan lingkungan alam masyarakatnya. Penyediaan tenaga guru yang betul-betul memahami dan menghayati nilai-nilai dan kehidupan masyarakat setempat, penyediaan sarana instruksional dan sumber-sumber belajar yang diperlukan untuk pengajaran muatan lokal, merupakan faktor penunjang utama dalam melaksanakan dan mengembangkan kurikulum muatan lokal. Karenanya, selain pihak sekolah, masyarakat juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan kurikulum muatan lokal.

Anak pada hakekatnya adalah individu rawan dari berbagai pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Individu pada usia sekolah dasar ini, lebih memberikan tantangan pada pihak sekolah untuk memberikan pengenalan lingkungan sekitar melalui kurikulum muatan lokal dengan lebih variatif dan menarik serta menyenangkan agar kurikulum muatan lokal dapat memberikan hasil yang maksimal bagi siswa. Pengembangan kurikulum muatan lokal pada siswa sekolah dasar lebih memberikan tantangan yang berarti bagi pihak sekolah untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yakni berkembangnya kompetensi daerah yang diwujudkan dalam pengeuasaan kompetensi muatan lokal oleh siswa.

Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu mata pelajaran di Lembaga Pendidikan Dasar mempunyai peranan yang sangat urgen dan signifikan dalam pembentukan moral, akhlak dan etika peserta didik yang sekarang ini sedang berada pada titik terendah dalam perkembangan masyarakat Indonesia. Kegagalan Pendidikan Agama Islam dalam menciptakan peserta didik yang berkarakter atau berkepribadian Islami didalam maupun diluar kelas terjadi karena kelemahan guru agama Islam dalam mengemas dan mendesain serta membawakan mata pelajaran kepada peserta didik. Ditambah lagi disebabkan ketiadaan penguasaan manajemen modern bagi guru Pendidikan Agama Islam dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah, sehingga sampai saat ini sulit sekali dikontrol dan dievaluasi keberhasilan dan kegagalannya. Padahal *quality control* itu seharusnya menjadi pegangan dalam melaksanakan proses Pendidikan Agama Islam, sejak di

tingkat *input* kemudian diproses, sampai pada *output*nya.³ Dari itu, pendekatan terhadap pengajaran juga menggunakan pendekatan Sistem.⁴

Oleh karena itu, lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan dasar harus pandai-pandai mengelola pelaksanaan kurikulum, khususnya mata pelajaran muatan lokal yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap hasil yang telah dicapai, sehingga dapat diformalisasikan dan tercermin dalam perilaku peserta didik. Dalam memanaj kurikulum muatan lokal sebaiknya menggunakan lebih dari dua pendekatan manajemen atau semuanya serta disesuaikan dengan kondisi agar tujuan Pendidikan Nasional, dan tujuan Pendidikan lembaga pendidikan mudah tercapai.

Salah satu lembaga pendidikan dasar yang eksis dianggap berhasil memanaj pelaksanaan kurikulum muatan lokal khususnya Pendidikan Agama Islam adalah SD Nurul Islam Purwoyoso Semarang, yang berada di Jl. Siliwangi No. 574 Ngaliyan Purwoyoso Semarang. Lembaga pendidikan ini dipandang sebagai Lembaga Pendidikan dasar favorit yang diidam-idamkan oleh setiap orang tua. Selain itu SD Nurul Islam Purwoyoso Semarang ini mandiri dan berhasil memanaj pelaksanaan kurikulum muatan lokal di tengah-tengah arus sentralisasi dan otonomi pendidikan yang sedang digulirkan oleh pemerintah dewasa ini sehingga bisa mengeliminir keprihatinan-keprihatinan dalam masyarakat dan menjawab tantangan zaman.

Secara umum kurikulum SD Nurul Islam mengacu pada kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional (KEMENDIKNAS), akan tetapi dalam hal kurikulum muatan lokal mengacu pada kurikulum Kementrian Agama (KEMENAG) yang dikembangkan dalam mapel diversifikasi muatan lokal agama (Bahasa Arab, Sejarah Kebudayaan Islam, Akidah Akhlak, Fiqih, Al-Quran Hadits, dan Baca Tulis Al-qur'an (BTA)).

³Tim Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Kendali Mutu Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Depag RI, 2003), Cet. 1, hlm. 1.

⁴Muhammad Ali, *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), Cet. 11, hlm. 30.

Melihat dari pentingnya kurikulum muatan lokal di sekolah yang sangat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi daerah, terlebih lagi pengembangan kurikulum muatan lokal yang lebih efektif dan variatif sangat dibutuhkan bagi siswa usia sekolah dasar maka penulis tertarik untuk mengangkat judul "Manajemen Pengembangan Kurikulum Diversivikasi Muatan Lokal Agama di SD Nurul Islam Purwoyoso Semarang".

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimanakah Pengembangan Kurikulum Diversifikasi Muatan Lokal Agama di SD Nurul Islam Purwoyoso Semarang?
- 2. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum Diversifikasi Muatan Lokal Agama di SD Nurul Islam Purwoyoso Semarang?
- 3. Bagaimanakah Evaluasi Pengembangan Kurikulum Diversifikasi Muatan Lokal Agama di SD Nurul Islam Purwoyoso Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi Proses Pengembangan Kurikulum Diversifikasi Muatan Lokal Agama di SD Nurul Islam Purwoyoso Semarang?
- b. Mengidentifikasi Proses Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum Diversifikasi Muatan Lokal Agama di SD Nurul Islam Purwoyoso Semarang?
- c. Mengidentifikasi Proses Evaluasi Pengembangan Kurikulum Diversifikasi Muatan Lokal Agama di SD Nurul Islam Purwoyoso Semarang?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis:

- 1) Dapat menambah wawasan, pengetahuan serta pengalaman peneliti mengenai pengelolaan dan manajemen pengembangan kurikulum.
- Sebagai bahan kajian ilmiah khususnya bagi mahasiswa jurusan Kependidikan Islam.

b. Manfaat praktis:

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan konstibusi konstruktif serta dijadikan bahan pertimbangan pengelola pendidikan khususnya komite sekolah atau Waka. kurikulum dalam merancang kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan landasan kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik dan budayanya.